

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POHUWATO)**

Oleh

**MEITA KALIGIS
NIM : E11.19.102**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI PADA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO)**

Oleh

**MEITA KALIGIS
E1119102**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 16 Mei 2023

PEMBIMBING I



Kartini Muslimin, SE., M.Ak
NIDN : 09 131276 01

PEMBIMBING II



Purnama Sari, SE., M.Si
NIDN : 09 120788 02

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO)

Oleh
MEITA KALIGIS
E1119102

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Sulfianty, SE.,M.Si**
(Ketua Penguji)
2. **Syamsuddin, SE.,Ak.,MM**
(Anggota Penguji)
3. **Agus Baku, SE.,M.Si**
(Anggota Penguji)
4. **Kartini Muslimin, SE.,M.Ak'**
(Pembimbing Utama)
5. **Purnama Sari, SE.,M.Si**
(Pembimbing Pendamping)



Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Musafir, SE.,M.Si
NIDN : 09 281169 01


Ketua Program Studi Akuntansi
Shella Budiawan, SE.,M.Ak
NIDN : 09 210892 02

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di universitas ichsan gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan ini.

Gorontalo, 10 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan



(MEITA KALIGIS)
NIM:E1119102

ABSTRAK

MEITA KALIGIS, E1119102. PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan secara parsial maupun simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. penelitian ini menggunakan survey kuesioner dengan metode analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri pada badan keuangan kabupaten pohuwato. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato.

Kata Kunci : PSAP, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi

ABSTRACT

MEITA KALIGIS, E1119102. THE INFLUENCE OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT AGENCIES (STUDIES ON REGIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS OF POHUWATO REGENCY).

This study aims to determine the effect of the Application of Government Accounting Standards and the quality of financial reports partially or simultaneously on the Performance Accountability of Government Agencies. This study used a questionnaire survey with multiple linear regression analysis method. The population in this study were all civil servants at the Pohuwato district financial agency. The results of the study show that the application of government accounting standards has a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies in the financial institutions of Pohuwato district.

The quality of financial statements has a positive and insignificant effect on the performance accountability of government agencies in the Pohuwato Regency Financial Institution.

Implementation of Government Accounting Standards and Quality of Financial Statements simultaneously has a positive and significant effect on Performance Accountability of Government Agencies in the Financial Institutions of Pohuwato Regency.

Keywords: PSAP, Quality of Financial Statements, Accountability for Agency Performance

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)”,sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG)
- Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
- Ibu Shella Budiawan, SE.,M.Ak, Selaku Ketua Program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo
- Ibu Kartini Muslimin, SE.,M.Ak sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.

- Ibu Purnama Sari.,SE.M.Si, sebagai pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulisan dalam mengerjakan penelitian ini.
- Ucapan terimakasih kepada kedua Orang Tua dan Keluarga yang telah membantu/mendukung penulis.
- Semua Teman-teman yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo,.....2023

penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	9
2.2. Kualitas Laporan Keuangan	10
2.3. Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	16
2.4 Kerangka Pemikiran	19
2.5. Hipotesis	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1. Objek penelitian	22
3.2. Metode penelitian	22
3.2.1. Desain Penelitian	23
3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian	23
3.3. Populasi	26

3.4. Teknik Pengumpulan Data	26
3.5. Metode Analisis Data	27
3.5.1 Uji Kualitas Data	27
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	29
3.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	33
3.7. Pengujian Hipotesis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	38
4.2.1 Uji Kualitas Data	38
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	41
4.2.3 Analisis Data.....	43
4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	53
4.3.1. Analisis Data.....	52
4.3.2. Analisis Korelasi.....	55
4.3.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t).....	57
4.3.4. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	58
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel.3.1	Operasional Variabel.....	25
Tabel.3.2	Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r.....	28
Tabel.4.1	Uji validitas variable X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan)	38
Tabel.4.2	Uji validitas variable X2 (<i>Kualitas Laporan Keuangan</i>	38
Tabel.4.3	Uji validitas variable Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).....	39
Tabel.4.4	Uji Reliabilitas Variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan)	39
Tabel.4.5	Uji Reliabilitas Variabel X2 (<i>Kualitas Laporan Keuangan</i>)	40
Tabel.4.6	Uji Reliabilitas Variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	40
Tabel.4.7	Hasil Uji Normalitas Data.....	41
Tabel.4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	41
Tabel.4.9	Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item	44
Tabel.4.10	Tanggapan responden untuk variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan)	44
Tabel.4.11	Item Pernyataan X11.....	44
Tabel.4.12	Item Pernyataan X12.....	44
Tabel.4.13	Item Pernyataan X13.....	45
Tabel.4.14	Item Pernyataan X14.....	45
Tabel.4.15	Item Pernyataan X15.....	45
Tabel.4.16	Item Pernyataan X16.....	46
Tabel.4.18	Item Pernyataan X21.....	47
Tabel.4.19	Item Pernyataan X22.....	47
Tabel.4.20	Item Pernyataan X23.....	48
Tabel.4.21	Item Pernyataan X24.....	48
Tabel.4.22	Item Pernyataan X25.....	48
Tabel.4.24	Statistics	49
Tabel.4.25	Item Pernyataan Y11.....	50
Tabel.4.26	Item Pernyataan Y12.....	50

Tabel.4.27 Item Pernyataan Y13.....50

Tabel.4.28 Item Pernyataan Y14.....51

Tabel.4.29 Item Pernyataan Y15.....51

Tabel.4.30 Item Pernyataan Y16.....51

Tabel.4.31 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda53

Tabel.4.33 Hasil Regresi Uji-F54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	64
Lampiran 2 Abstrak.....	65
Lampiran 3 Hasil Olah Data	67
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	78
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian	79
Lampiran 6 Surat Bebas Plagiasi	80
Lampiran 7 Hasil Turnitin.....	81
Lampiran 8 Curriculum Vitae	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Pemerintahan sebagai organisasi yang bergcrak di bidang jasa pelayanan publik, dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, mcnyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo; 2009:20).

Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kineija instansi pemerintah. Akuntabilitas kineija instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum dialur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di

pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Deddi, 2008:25).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan. dan dapat dipahami. Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD. artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu enlilas pemerintah daerah

tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeioloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP) dan Pemyataan Menolak memberikan opini.

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Dodi dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo). Disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 54,7% variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Kualitas pelaporan keuangan.

Nurhasanah Tussakdiyah (2017) yang berjudul pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan terhadap akuntablitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten organ hilir (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Organ Hilir) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir). Jenis penelitian yaitu kausalitas. Data yang digunakan data primer

dan sekunder. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan sampel jenuh atau sensus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

M Hafiz Raehan (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Propinsi Sumatera Utara) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara)”. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Variabel Independen pada penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan sedangkan Variabel Dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jumlah populasi penelitian ini terdiri dari 15 Dinas dengan menggunakan *sampel jenuh* diperoleh 45 orang sebagai sampel. Jenis data yang dipakai adalah data primer.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh

signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara). Secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara).

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga berdasarkan hasil riset sebelumnya, sehingganya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohnuato)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Laporan Keuangan secara parsial Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Bagaimana pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan standar akuntansi pemerintahan dan juga kualitas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang hendak di pecahkan, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Laporan Keuangan secara parsial Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan serta pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi Akademisi

Sebagai dasar untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan terkait kinerja di lingkungan pemerintahan

3. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan juga sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005).

Menurut Sinaga (2005), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholder* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar (Ritonga, 2009).

Menurut Wijaya (2008), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah

satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2010:25). Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Laporan keuangan organisasi sektor publik dibuat tentunya mempunyai tujuan dan fungsi secara umum bagi organisasi pemerintahan, antara lain: (Mardiasmo, 2009:162)

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban {accountability} dan pengelolaan (stewardship);
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

Adapun penjelasan dari karakteristik kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: (Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010)

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- 1) Memiliki umpan balik {Feedback Value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Manfaat prediktif {Predictive Value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian yang jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Mulyana, (2010) dalam susilawati dan riana, (2014) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi. Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan

tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Menurut PSAK No. 1 (2015:1) laporan keuangan adalah Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Rahmadani (2015:124), tujuan umum suatu laporan keuanganmkhususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan

sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatuentitas dalam proses pelaporan yang dapat digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Menurut Muhardi (2013: 172), laporan keuangan adalah Laporan keuangan dapat diibaratkan sebuah peta yang berguna bagi pihak-pihak yang sedang melakukan perjalanan. Dengan melihat pada peta yang ada, maka pihak yang sedang melakukan perjalanan tersebut dapat mencapai tujuan akhir

dengan cara yang tepat dan tidak tersesat ditengah perjalanan. Pengguna dari laporan keuangan sendiri adalah manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

2.3. Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi lain dari, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP).

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengeioloan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2009: 21).

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang

dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Turner dan Humle pada Mardiasmo, 2009:21).

Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu: (Mardiasmo, 2009:21)

- a. Akuntabilitas Vertikal {Vertical Accountability) Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengeioloan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.
- b. Akuntabilitas Horizontal {Horizontal Accountability) Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Definisi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Keputusan Kepala LAN No. 293/IX/6/8/2003).

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (Keputusan Kepala LAN No. 293/IX/6/8/2003):

- 1) Perencanaan Strategik Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- 2) Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan.
- 3) Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula

analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategik.

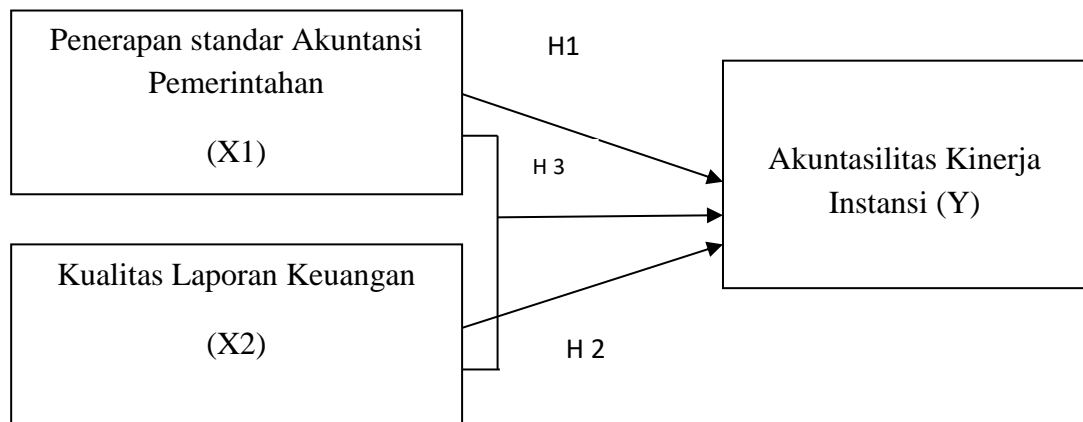
- 4) Pelaporan Kinerja Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2.4.Kerangka Pemikiran

Akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Pemerintahan sebagai organisasi yang bergcrak di bidang jasa pelayanan publik, dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, mcnyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo; 2009:20).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait

antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan uraian yang ada sebelumnya, dibawah ini gambar kerangka piker dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data Sugiyono (2014: 64). Adapun Hipotetsis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial Berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
2. Kualitas laporan keuangan secara parsial Berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

3. Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas laporan keuangan secara simultan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan) serta variabel dependen (akuntabilitas kinerja). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan menggunakan instrument kuesioner di lapangan.

3.2. Metode penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:38) "Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sedangkan Sugiyono (2012) menerangkan "Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data valid". Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa metode adalah cara yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan pengolahan data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan desainnya adalah rencana atau Rancangan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey, sehingga informasi yang diperoleh berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda.

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian dilakukan peneliti guna untuk membuktikan hipotesis yang telah disusun, maka diteliti variabel-variabel yang terkait. Adapun variabel tersebut adalah variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan) serta variabel dependen (akuntabilitas kinerja).

3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Berikut pengertian variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan dalam rangka menciptakan transparansi keuangan pemerintah dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan

2. Kualitas Laporan Keuangan

Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya

3. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas dalam penelitian ini diartikan sebagai kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Untuk mengukur variabel ini digunakan indikator berupa :

- 1) Akuntabilitas Kejujuran & Akuntabilitas Hukum, merupakan pelaporan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan.
- 2) Akuntabilitas Proses, merupakan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dengan menggunakan proses, prosedur dan ukuran – ukuran.
- 3) Akuntabilitas Pelaksanaan, merupakan pengamatan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan efektif.
- 4) Akuntabilitas Program, merupakan penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Akuntabilitas Kebijakan, merupakan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan.

Operasionalisasi variabel ini diperlukan untuk menjabarkan variabel-variabel penelitian ke dalam indikator tertentu untuk memudahkan pengukurannya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengumpulan data untuk menjawab masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini. dan untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi variabel yang akan diukur, sehingga variabel-variabel yang akan diteliti diberi batasan-batasan secara operasional. Berikut dibawah ini tabel operasionalisasi variabel :

Tabel. 3.1 Operasional Variabel

Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukuran
Dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.	: 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Pelaksanaan 4. Akuntabilitas Program 5. Akuntabilitas Kebijakan	Interval
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan dalam rangka menciptakan transparansi keuangan pemerintah dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan	1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual 2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya	Interval
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No71 Tahun 2010 tentang SAP)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (PP No71 Tahun 2010 tentang SAP)	Interval

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

3.3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit untuk pengukuran yang menjadi obyek penelitian (Riduwan, 2010: 54)

Sedangkan menurut Sugiyono (2011: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian tarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pohuwato. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebanyak 60 orang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan lewat penelitian lapangan yaitu melalui kuisisioner, wawancara apabila diperlukan, dan arsip data lain yang terkait. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut:

1. Penggunaan Kuisisioner

Penggunaan kuisisioner adalah cara-cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti (populasi).

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan langsung tanya jawab kepada objek yang diteliti yang mengetahui persoalan terkait dengan objek yang diteliti.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya instrument kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus dibuang/diganti karena bernilai negative, atau positif namun lebih kecil dari r tabel, sehingga pernyataan dinyatakan invalid. Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *confirmatory analysis factor* dan melihat nilai *correlated item* dengan bantuan software SPSS. Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan rumus korelasi seperti yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n.\sum X^2 - (\sum X)^2\}.\{n.\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r : Angka korelasi

X : Skor Pertanyaan (ke-n) variabel x

Y : Skor Pertanyaan (ke-n) variabel Y

n : Jumlah responden

XY : Skor pertanyaan dikali total pertanyaan

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :

$$t_{Hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana:

t : Nilai Hitung

r : Koefisien korelasi hasil r hitung

n : Jumlah responden

Ditribusi (tabel t) untuk $\alpha = 0.05$ dan derajat kebebasan (dk= n-2), kaidah keputusan, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti valid, sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak valid. Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60-0,799	Kuat
0,40-0,599	Cukup Kuat
0,20-0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat Rendah

Sumber: Riduwan (2010:136)

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukkan koefisien reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *croanbach's alpha*. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *croanbach's alpha* dengan bantuan software SPSS. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel (Ghozali, 2011). Dengan rumus Spearman Brown, sebagai berikut :

$$r_i = \frac{2 \cdot r_b}{1 + r_b}$$

Dimana :

r_i = Koefisien reliabilitas internal seluruh instrumen atau pernyataan

r_b = Korelasi *product moment* antara belahan (ganjil-genap) atau (awal-akhir)

Reliabel setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r_i positif dan r hitung $>$ r tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah handal.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Sminorv test*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai sign hitung $> 0,05$ maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2011).

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai Tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2006).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali 2011). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara lain prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Untuk memecahkan masalah pokok dan membuktikan hipotesis, maka digunakan metode analisis regresi berganda, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas dalam hal ini Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Kualitas Laporan Keuangan (X2) terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y).

Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

ε	=	Standar error atau variabel yang tidak diteliti
Y	=	Akutabilitas Kinerja Instansi
α	=	ntabilitas Kinerja Instansi Nilai konstan atau nilai tetap
b_1	=	Parameter (koefisien variabel)
b_2	=	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
X_1	=	Kualitas Laporan Keuangan
X_2		

Sedangkan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis baik melalui uji T maupun uji F.

1. Uji Statistik t

$$t = \sqrt{\frac{n-2}{r^2(1-r^2)}}$$

Dimana:

t = Nilai t hitung

n = Jumlah sampel

r = Koefisien korelasi

Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima, maka nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel . Jika nilai t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Sebaliknya jika nilai t hitung < t tabel, maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.

2. Uji Statistik F

$$F_{hitung} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Dimana:

R = Nilai koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel bebas (independen)

n = Jumlah sampel

F_{hitung} = Nilai F yang dihitung

Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima, maka nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel . Jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Sebaliknya jika nilai F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.

3.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien (R^2) yang nilainya antara 0 - 1. Semakin besar R^2 (mendekati 1) semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Koefisien determinasi dinyatakan dalam R^2 , untuk variabel independen yang lebih dari satu variabel, maka menggunakan adjusted R^2 , karena setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk lebih menggunakan nilai adjusted pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik (Ghozali, 2011).

3.7. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yakni :

1. Pengujian Hipotesis secara Parsial

Pengujian koefisien regresi secara parsial dimaksudkan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t. Uji ini dilakukan dengan membandingkan *probability value* (tingkat signifikansi) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* hasil penelitian. Dengan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. Jika *probability value* hasil penelitian \leq *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif dan signifikan.
2. Jika *probability value* hasil penelitian \geq *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak dan tidak signifikan.

2. Pengujian Hipotesis secara Simultan

Pengujian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen (Algifari, 2000). Untuk itu perlu dilakukan uji ANOVA atau uji F dengan membandingkan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* hasil penelitian. Tingkat signifikansi untuk penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05.

Dengan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika *probability value* hasil penelitian \leq *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif dan signifikan.
2. Jika *probability value* hasil penelitian \geq *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak dan tidak signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

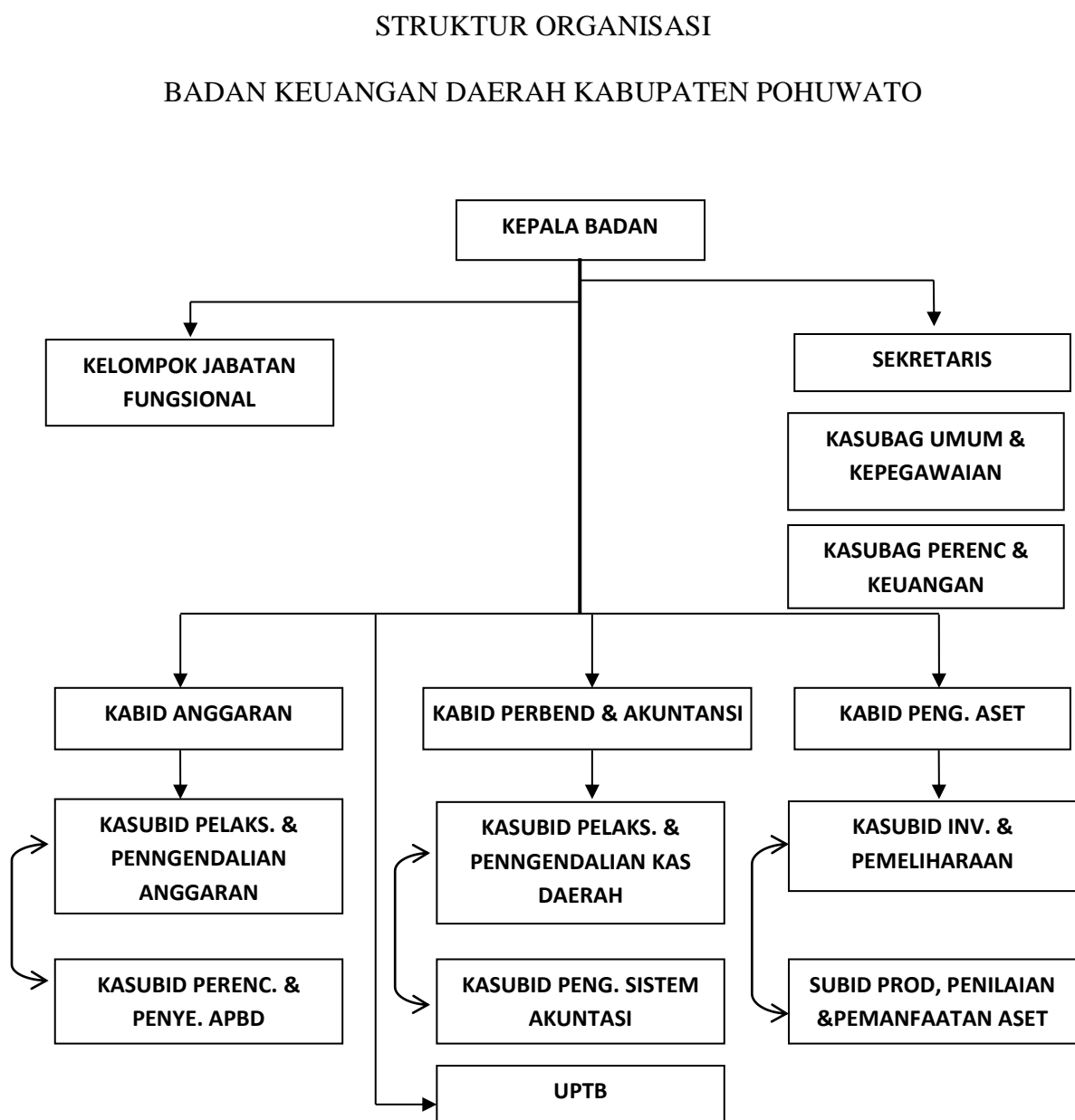
Sejak terbentuknya Kabupaten Pohuwato sebagai daerah pemekaran pada bulan Oktober 2003, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohuwato masih dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mini yang merupakan pelimpahan sebagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo sebagai kabupaten induk. Organisasi keuangan daerah ini adalah Badan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Seiring dengan perkembangan waktu dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 01 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kabupaten Pohuwato, perbedaan dengan periode sebelumnya adalah sejak tahun 2013, Badan Pendapatan tidak lagi menjadi bagian dalam organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah. Bidang pendapatan berubah status berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Kepemimpinan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah sudah tiga mengalami pergantian, dimana pada periode 2012 sampai sekarang di pimpin oleh Drs. Ahmad Djuuna, dan dalam perjalanan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah, prestasi yang diraih adalah penghargaan berprestasi berdasarkan kinerja keuangan dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2007 sampai dengan

tahun 2012, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI tahun 2013 dan tahun 2014, Rangkai 2 SKPD berkinerja tinggi, terbaik III penataan Kantor dan Halaman dan beberapa prestasin di bidang olahraga dan seni budaya.

Adapun struktur organisasi BKD Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut.



4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Uji Kualitas Data

a. Uji validitas

Tabel 4.1 Uji validitas variable X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan)

Item	r hitung	r tabel	Sig	Ket
X11	0,687	0.361	0,000	Valid
X12	0,680	0.361	0,000	Valid
X13	0,390	0.361	0,033	Valid
X14	0,614	0.361	0,000	Valid
X15	0,645	0.361	0,000	Valid
X16	0,705	0.361	0,000	Valid

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item pernyataan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), semua item dinyatakan valid.

Tabel 4.2 Uji validitas variable X2 (Kualitas Laporan Keuangan)

Item	r hitung	r tabel	Sig	Ket
X21	0,600	0.361	0,000	Valid
X22	0,897	0.361	0,000	Valid
X23	0,728	0.361	0,000	Valid
X24	0,622	0.361	0,000	Valid
X25	0,795	0.361	0,000	Valid
X26	0,587	0.361	0,001	Valid

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan (X2), semua item dinyatakan valid.

Tabel 4.3 Uji validitas variable Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Item	r hitung	r table	Sig	Ket
Y11	0,663	0.361	0,000	Valid
Y12	0,523	0.361	0,003	Valid
Y13	0,349	0.361	0,055	Valid
Y14	0,905	0.361	0,000	Valid
Y15	0,683	0.361	0,000	Valid
Y16	0,415	0.361	0,023	Valid

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item pernyataan variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) semua item dinyatakan valid.

b. Uji reliabilitas

Tabel 4.4. Uji Reliabilitas Variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan)

Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket
X11	.707	Reliabel
X12	.713	Reliabel
X13	.753	Reliabel
X14	.725	Reliabel
X15	.716	Reliabel
X16	.706	Reliabel

Sumber : Hasil olah data 2023

Nilai koefisien alpha untuk variabel X1 lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel.

Tabel 4.5. Uji Reliabilitas Variabel X2 (*Kualitas Laporan Keuangan*)

Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket
X21	.764	Reliabel
X22	.713	Reliabel
X23	.741	Reliabel
X24	.758	Reliabel
X25	.742	Reliabel
X26	.763	Reliabel

Sumber : Hasil olah data 2023

Nilai koefisien alpha untuk variabel X2 lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel.

Tabel 4.6. Uji Reliabilitas Variabel Y (*Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*).

Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket
Y11	.697	Reliabel
Y12	.722	Reliabel
Y13	.748	Reliabel
Y14	.652	Reliabel
Y15	.694	Reliabel
Y16	.736	Reliabel

Sumber : Hasil olah data 2023

Nilai koefisien alpha untuk variabel Y lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	14.1333333
	Std. Deviation	2.57255379
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.151
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.826
Asymp. Sig. (2-tailed)		.503

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil olah data 2023

Probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,503. Nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dengan demikian data masuk kategori terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

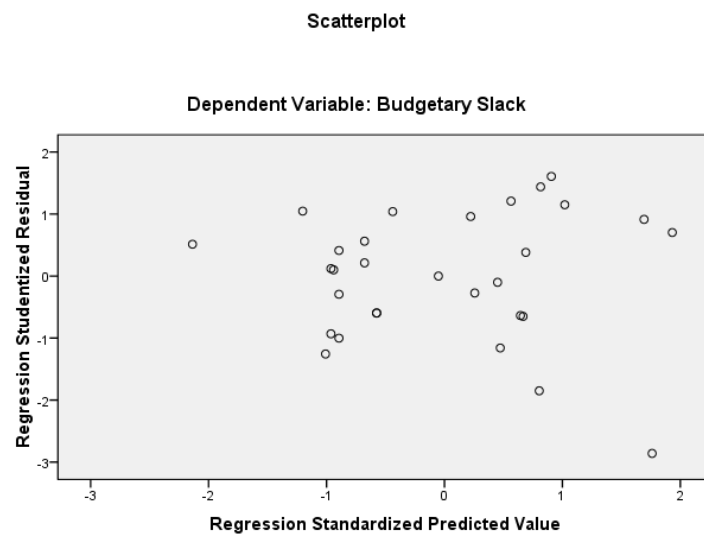
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.375	2.668
	Kualitas Laporan Keuangan	.375	2.668

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Hasil olah data 2023

Nilai VIF yang ada diatas menunjukkan angka lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan output scatterplots diatas diketahui bahwa :

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
3. Penyebaran titik-titik data tidak berbentuk pola bergelombang menyebar kemudian, menyempit dan melebar kembali
4. penyebaran titik-titik data tidak berpola

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4.2.3 Analisis Data

4.2.3.1. Analisis Deskriptif

Variabel dalam penelitian ini yakni Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2) sedangkan variabel (Y) yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun total pertanyaan/ Pernyataan sebanyak 16 item dan setiap item pertanyaan/ pernyataan hanya direspon oleh 30 orang responden dari total populasi 60 orang dalam penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian.

Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan, selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya:

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 30 = 30$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 30 = 150$$

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{150 - 30}{5} = 24$$

Tabel 4.9**Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item**

Range	Kategori
127 - 150	Sangat besar
103 - 126	Besar
79 - 102	Sedang
55 - 78	Kecil
30 - 54	Sangat kecil

Sumber : Hasil olah data 2023

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pertanyaan/ Pernyataan pada masing – masing indikator untuk setiap variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Tanggapan responden untuk variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan)

	X11	X12	X13	X14	X15	X16
N Valid	30	30	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0	0	0
Sum	85	76	80	66	70	72

Sumber : Hasil olah data 2023**Tabel. 4.11 item pernyataan X11**

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	3	10.0	10.0
2	13	43.3	43.3
3	3	10.0	10.0
4	8	26.7	26.7
5	3	10.0	10.0
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.12 item pernyataan X12

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	3	10.0	10.0
2	16	53.3	53.3
3	5	16.7	16.7
4	4	13.3	13.3
5	2	6.7	6.7
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.13 item pernyataan X13

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	3	10.0	10.0
2	13	43.3	43.3
3	7	23.3	23.3
4	5	16.7	16.7
5	2	6.7	6.7
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.14 item pernyataan X14

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	6	20.0	20.0
2	17	56.7	56.7
3	3	10.0	10.0
4	3	10.0	10.0
5	1	3.3	3.3
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.15 item pernyataan X15

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	7	23.3	23.3
	2	13	43.3	43.3
	3	5	16.7	16.7
	4	3	10.0	10.0
	5	2	6.7	6.7
Total		30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.16 item pernyataan X16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	20.0	20.0	20.0
	2	14	46.7	46.7	66.7
	3	4	13.3	13.3	80.0
	4	4	13.3	13.3	93.3
	5	2	6.7	6.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan jawaban responden untuk variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) dapat dilihat bahwa tanggapan responden untuk indikator pertama sebesar 85 berada pada kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa informasi disajikan dengan jujur dan terbuka (tidak adayang ditutupi).

Tanggapan responden untuk indikator kedua sebesar 76 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan asset telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan.

Tanggapan responden untuk indikator ketiga sebesar 80 berada pada kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan utang telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan.

Tanggapan responden untuk indikator keempat sebesar 66 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan.

Tanggapan responden untuk indikator kelima sebesar 70 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran penerimaan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pengeluaran.

Tanggapan responden untuk indikator keenam sebesar 72 berada pada kategori kecil.

a. Tanggapan responden untuk variabel X2 (Kualitas Laporan Keuangan)

		X21	X22	X23	X24	X25	x26
N	Valid	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0
Sum		73	74	80	75	63	72

Tabel. 4.18 item pernyataan X21

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	5	16.7	16.7
	2	13	43.3	43.3
	3	7	23.3	23.3
	4	4	13.3	13.3
	5	1	3.3	3.3
	Total	30	100.0	100.0

Tabel. 4.19 item pernyataan X22

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	8	26.7	26.7
2	12	40.0	40.0
3	2	6.7	6.7
4	4	13.3	13.3
5	4	13.3	13.3
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.20 item pernyataan X23

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	8	26.7	26.7
2	6	20.0	20.0
3	7	23.3	23.3
4	6	20.0	20.0
5	3	10.0	10.0
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.21 item pernyataan X24

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	6	20.0	20.0
2	12	40.0	40.0
3	5	16.7	16.7
4	5	16.7	16.7
5	2	6.7	6.7
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.22 item pernyataan X25

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	9	30.0	30.0
2	14	46.7	46.7
3	3	10.0	10.0
4	3	10.0	10.0
5	1	3.3	3.3
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan jawaban responden untuk variabel X2 (Kualitas Laporan Keuangan) dapat dilihat bahwa tanggapan responden untuk indikator pertama sebesar 73 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa telah dilaksanakan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.

Tanggapan responden untuk indikator kedua sebesar 74 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya insentif berupa imbalan atau pengakuan positif tidak menghambat penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan di organisasi.

Tanggapan responden untuk indikator ketiga sebesar 80 berada pada kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.

Tanggapan responden untuk indikator keempat sebesar 75 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program yang telah dilakukan.

Tanggapan responden untuk indikator kelima sebesar 63 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program anggaran pengeluaran.

Tanggapan responden untuk indikator keenam sebesar 72 berada pada kategori kecil.

b. Tanggapan responden untuk variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Tabel. 4.24 Statistics

		Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
N	Valid	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0
Sum		69	86	78	64	68	59

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.25 item pernyataan Y11

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	6	20.0	20.0
2	16	53.3	53.3
3	4	13.3	13.3
4	1	3.3	3.3
5	3	10.0	10.0
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.26 item pernyataan Y12

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	2	6.7	6.7
2	11	36.7	36.7
3	8	26.7	26.7
4	7	23.3	23.3
5	2	6.7	6.7
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.27 item pernyataan Y13

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	5	16.7	16.7
2	10	33.3	33.3
3	7	23.3	23.3
4	8	26.7	26.7
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.28 item pernyataan Y14

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	9	30.0	30.0
2	14	46.7	46.7
3	2	6.7	6.7
4	4	13.3	13.3
5	1	3.3	3.3
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.29 item pernyataan Y15

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	8	26.7	26.7
2	12	40.0	40.0

3	6	20.0	20.0
4	2	6.7	6.7
5	2	6.7	6.7
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Tabel. 4.30 item pernyataan Y16

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	8	26.7	26.7
2	18	60.0	60.0
3	2	6.7	6.7
4	1	3.3	3.3
5	1	3.3	3.3
Total	30	100.0	100.0

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan jawaban responden untuk variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dapat dilihat bahwa tanggapan responden untuk indikator pertama sebesar 69 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi dapat memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu .

Tanggapan responden untuk indikator kedua sebesar 86 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan diselesaikan cukup tepat waktu.

Tanggapan responden untuk indikator ketiga sebesar 78 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan oleh instansi bebas dari kesalahan yang bersifat material.

Tanggapan responden untuk indikator keempat sebesar 64 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa transaksi yang disajikan oleh instansi cukup tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.

Tanggapan responden untuk indikator kelima sebesar 68 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh instansi cukup dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya.

Tanggapan responden untuk indikator keenam sebesar 59 berada pada kategori kecil, hal ini menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh instansi cukup dipahami pengguna.

4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Data

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2) secara parsial maupun secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Selengkapnya ada pada lampiran)

Tabel 4.31 Hasil Analisis Regresi linear Berganda**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.943	2.036		2.428	.022
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.557	.214	.607	2.600	.015
Kualitas Laporan Keuangan	.059	.175	.078	.334	.741

- a. Dependent Variable:
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Sumber : Hasil olah data 2023

Model persamaan regresi yang dapat di gambarkan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi standardized adalah sebagai berikut :

$$Y = 4,943 + 0,557X_1 + 0,059 X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

Konstanta (a) yang didapatkan nilai sebesar 4,943 menggambarkan, tingkat Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun termaksud Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan atau semua variabel yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diasumsikan sama dengan nol.

Koefisien regresi β_1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,557 artinya nilai koefisien β_1 adalah positif, atau setiap

peningkatan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,557.

Koefisien regresi β_2 Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,059 artinya nilai koefisien β_2 adalah positif artinya setiap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mempengaruhi sebesar 0,059.

Table 4.32 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	.449	.408	2.954

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sumber : Hasil olah data 2023

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,449 memiliki makna bahwa 44,9% variasi naik turunnya variabel (Y Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mampu dipengaruhi oleh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Kualitas Laporan Keuangan (X2). Sedangkan sisanya sebesar 55,1% dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti.

4.3.2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini korelasi yang akan diukur adalah korelasi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato sebagaimana yang tertera pada tabel hasil olahan data berikut:

Correlations

		Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kualitas Laporan Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	1	.693**	.738**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	30	30	30
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation	.693**	1	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	30	30	30
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pearson Correlation	.738**	.830**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil olah data 2023

Pada tabel di atas, besarnya hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato dimana r sebesar 0.738. artinya, hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kualitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato sebesar 73,80% secara langsung dan hubungan tersebut masuk dalam kategori kuat.

4.3.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H_1) dan hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel X_1 , X_2 terhadap Y maka dilakukan uji-t. Uji-t dilakukan untuk membandingkan nilai t_{tabel} dan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka hipotesis penelitian diterima. Sebaliknya jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$), maka hipotesis penelitian ditolak. Adapun nilai t_{tabel} untuk $\alpha = 5\%$.

Uji signifikansi juga dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian dapat diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak.

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

H_1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} 2,600 Nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,697 (t_{hitung} 2,600 > t_{tabel} 1,697) nilai t hitung menunjukkan angka positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 angka ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian

yang menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sepenuhnya di terima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

H₂ : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan perhitungan analisis regresi diperoleh t_{hitung} sebesar 0,334 Nilai ini lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,697 ($t_{hitung} 0,334 < t_{tabel} 1,697$) nilai t hitung menunjukkan angka positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,741 angka ini lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak sepenuhnya diterima.

4.3.4. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Pengujian hipotesis uji-F digunakan untuk melihat pengujian signifikansi koefisien regresi secara bersama-sama atau secara keseluruhan (*Testing The Overall Significance of Regression*). Pengujian hipotesis Uji-F dilihat melalui uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan tingkat signifikansi dengan (*probability value*) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* lebih kecil dari 0,05. Hasil regresi dari Uji-F dapat dilihat pada Tabel 4.33 berikut.

Tabel 4.33 Hasil regresi Uji-F**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	191.923	2	95.961	11.000	.000 ^a
	Residual	235.544	27	8.724		
	Total	427.467	29			

- a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Hasil olah data 2023

Pengujian terhadap hipotesis ketiga yaitu pengaruh variabel indepeden terhadap variabel dependen secara simultan menggunakan uji F.

H3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda pada tabel di atas, nampak bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($11.000 > 1,84$) nilai F hitung menunjukkan angka positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 angka ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sepenuhnya di terima.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato.
2. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka yang dapat peneliti sarankan adalah sebagai berikut:

1. Pihak pengambil kebijakan lebih meningkatkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan agar dalam pelaporan keuangan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Pihak pengambil kebijakan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja bagi para pejabat struktural berdasarkan pada pencapaian target anggaran

bahwa kinerja dan penghargaannya dinilai berdasarkan pada target anggaran yang capai.

3. Pihak pengambilan kebijakan harus memperhatikan Kualitas Laporan Keuangan Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang cukup ketat pada saat penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Nordiawan, Deddi dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Undang Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeioloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Arif, Dody. 2014. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Indonesia Periode 2007 – 2013. Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 19 No. 3 : 63 – 77
- Nurhasanah Tussakdiyah.2017. pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten organ hilir (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Organ Hilir). Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi.Dipublikasikan
- M Hafiz Raehan.2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Propinsi Sumatera Utara). Universitas Sumatera Utara.Skripsi.Dipublikasikan
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005
- Sinaga.2005. Pengantar Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Andi
- Ritonga, Irwan. 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Wijaya, Hadiano. 2008. Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran, Likuiditas, dan profitabilitas terhadap Struktur Modal Emiten Sektor Ritel di BEI: Sebuah pengujian Hipotesis Pecking Order. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 7 (1): 71-82.
- Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010
- Susilawati dan Dwi Seftihani Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: STAR-Study & Accounting Research. Vol. XI, No. 1

Defitri, Siska Yulia (2016). “pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”. Jurnal. ISSN: 2541- 111

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan

Safitri, Rahmadani. 2015. Pengaruh Kompensasi Loyalitas Karyawan PT. Putera lautan Kumala Lines Samarinda. eJournal Administrasi Bisnis, 2015, 3 (3): 650-660 . <http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id>

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta.Bandung.

Sugiyono . 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi 4.BP-UNDIP. Semarang.

SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kineija instansi pemerintah

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2022/2023																																			
	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Observasi			■																																	
Usulan Judul				■	■																															
Penyusunan					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Ujian Proposal																					■															
Revisi Proposal																						■	■													
Pengolahan																							■	■	■	■										
Ujian Skripsi																									■											
Revisi Skripsi																										■	■	■	■							

Lampiran 2

Abstrak

ABSTRAK

MEITA KALIGIS, E1119102. PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan secara parsial maupun simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. penelitian ini menggunakan survey kuesioner dengan metode analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri pada badan keuangan kabupaten pohuwato. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato.

Kata Kunci : PSAP, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi



ABSTRACT

MEITA KALIGIS, E1119102. THE INFLUENCE OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT AGENCIES (STUDIES ON REGIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS OF POHUWATO REGENCY).

This study aims to determine the effect of the Application of Government Accounting Standards and the quality of financial reports partially or simultaneously on the Performance Accountability of Government Agencies. This study used a questionnaire survey with multiple linear regression analysis method. The population in this study were all civil servants at the Pohuwato district financial agency. The results of the study show that the application of government accounting standards has a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies in the financial institutions of Pohuwato district.

The quality of financial statements has a positive and insignificant effect on the performance accountability of government agencies in the Pohuwato Regency Financial Institution.

Implementation of Government Accounting Standards and Quality of Financial Statements simultaneously has a positive and significant effect on Performance Accountability of Government Agencies in the Financial Institutions of Pohuwato Regency.

Keywords: *PSAP, Quality of Financial Statements, Accountability for Agency Performance*



Lampiran 3 Hasil Olah Data

Rekapitulasi Jawaban Responden

RES	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	2	2	2	2	3	2	13
2	2	2	2	2	1	2	11
3	1	1	1	1	1	1	6
4	2	2	2	2	1	2	11
5	4	1	1	1	2	2	11
6	5	2	2	4	2	2	17
7	4	4	2	2	3	3	18
8	4	4	2	2	2	2	16
9	4	2	2	2	4	4	18
10	4	2	2	2	4	4	18
11	2	2	5	2	2	2	15
12	2	2	1	2	2	1	10
13	2	2	3	1	2	1	11
14	3	4	3	4	5	3	22
15	2	1	3	2	2	1	11
16	1	2	3	2	2	2	12
17	2	3	5	3	1	3	17
18	1	3	3	1	2	2	12
19	4	3	4	5	3	4	23
20	3	2	4	2	1	5	17
21	2	2	3	1	1	2	11
22	2	2	2	2	3	2	13
23	2	2	2	2	1	2	11

24	4	5	2	2	4	5	22
25	5	5	3	3	2	1	19
26	2	3	4	4	3	2	18
27	4	4	4	2	2	3	19
28	5	2	2	1	5	4	19
29	3	3	2	2	2	1	13
30	2	2	4	3	2	2	15

RES	Kualitas Laporan Keuangan (X2)						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	1	1	1	2	1	2	8
2	2	1	3	1	1	2	10
3	1	1	1	1	1	1	6
4	4	1	4	1	1	2	13
5	1	1	1	2	1	2	8
6	2	2	4	4	2	2	16
7	2	2	2	4	2	3	15
8	2	2	4	4	2	2	16
9	2	2	2	4	2	4	16
10	2	2	2	2	2	4	14
11	2	2	2	2	2	2	12
12	2	1	1	2	2	1	9
13	3	2	2	3	2	1	13
14	3	4	5	3	4	3	22
15	3	2	1	2	2	1	11
16	2	2	3	2	2	2	13
17	3	5	4	2	3	3	20

18	3	2	3	2	1	2	13
19	3	5	3	5	3	4	23
20	2	4	1	1	2	5	15
21	1	2	1	3	4	2	13
22	1	1	1	2	1	2	8
23	2	1	3	1	1	2	10
24	2	4	4	5	5	5	25
25	2	2	3	3	1	1	12
26	4	4	5	3	3	2	21
27	3	3	4	1	2	3	16
28	5	5	3	2	2	4	21
29	4	3	2	2	2	1	14
30	4	5	5	4	4	2	24

RES	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	4	5	4	28
2	3	3	3	4	4	4	21
3	4	5	5	1	1	5	21
4	3	3	3	4	4	4	21
5	5	5	5	1	2	5	23
6	4	2	4	2	2	4	18
7	4	4	4	2	2	4	20
8	4	4	4	2	2	4	20
9	4	4	4	2	2	4	20
10	4	4	4	2	5	4	23
11	4	4	4	2	5	4	23

12	3	2	2	2	3	3	15
13	4	5	5	4	3	4	25
14	3	5	1	4	3	3	19
15	4	4	5	4	4	4	25
16	4	5	5	4	3	4	25
17	4	3	3	5	3	4	22
18	4	4	5	4	4	5	26
19	3	5	1	4	3	4	20
20	2	4	1	4	3	5	19
21	3	2	4	2	4	5	20
22	5	5	5	4	5	4	28
23	3	3	3	4	4	4	21
24	2	2	3	4	4	4	19
25	3	3	2	2	1	1	12
26	3	3	2	2	1	1	12
27	3	4	5	2	2	1	17
28	2	3	4	2	2	4	17
29	5	4	4	4	3	3	23
30	3	2	2	2	1	2	12

Uji Validitas

Uji validitas variable X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan)

Item	r hitung	r tabel	Sig	Ket
X11	0,687	0.361	0,000	Valid
X12	0,680	0.361	0,000	Valid
X13	0,390	0.361	0,033	Valid
X14	0,614	0.361	0,000	Valid

X15	0,645	0.361	0,000	Valid
X16	0,705	0.361	0,000	Valid

Uji validitas variable X2 (Kualitas Laporan Keuangan)

Item	r hitung	r tabel	Sig	Ket
X21	0,600	0.361	0,000	Valid
X22	0,897	0.361	0,000	Valid
X23	0,728	0.361	0,000	Valid
X24	0,622	0.361	0,000	Valid
X25	0,795	0.361	0,000	Valid
X26	0,587	0.361	0,001	Valid

Uji validitas variable Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Item	r hitung	r table	Sig	Ket
Y11	0,663	0.361	0,000	Valid
Y12	0,523	0.361	0,003	Valid
Y13	0,349	0.361	0,055	Valid
Y14	0,905	0.361	0,000	Valid
Y15	0,683	0.361	0,000	Valid
Y16	0,415	0.361	0,023	Valid

Reliability

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y11	25.97	48.585	.565	.697
Y12	25.40	51.490	.410	.722
Y13	25.67	54.506	.210	.748
Y14	26.13	44.809	.873	.652
Y15	26.00	48.276	.591	.694
Y16	26.30	54.079	.312	.736
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	14.13	14.740	1.000	.635

Reliability

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X21	26.70	93.045	.529	.764
X22	26.67	81.264	.865	.713
X23	26.47	86.464	.657	.741
X24	26.63	90.930	.543	.758
X25	27.03	88.585	.752	.742
X26	26.73	92.133	.504	.763

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X21	26.70	93.045	.529	.764
X22	26.67	81.264	.865	.713
X23	26.47	86.464	.657	.741
X24	26.63	90.930	.543	.758
X25	27.03	88.585	.752	.742
X26	26.73	92.133	.504	.763
Kualitas Laporan Keuangan	14.57	26.185	1.000	.800

Reliability

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X11	27.10	57.266	.596	.707
X12	27.40	58.869	.601	.713
X13	27.27	63.995	.271	.753
X14	27.73	60.685	.531	.725
X15	27.60	58.800	.553	.716
X16	27.53	57.568	.624	.706

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X11	27.10	57.266	.596	.707
X12	27.40	58.869	.601	.713
X13	27.27	63.995	.271	.753
X14	27.73	60.685	.531	.725
X15	27.60	58.800	.553	.716
X16	27.53	57.568	.624	.706
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	14.97	17.482	1.000	.682

Uji Asumsi Klasik

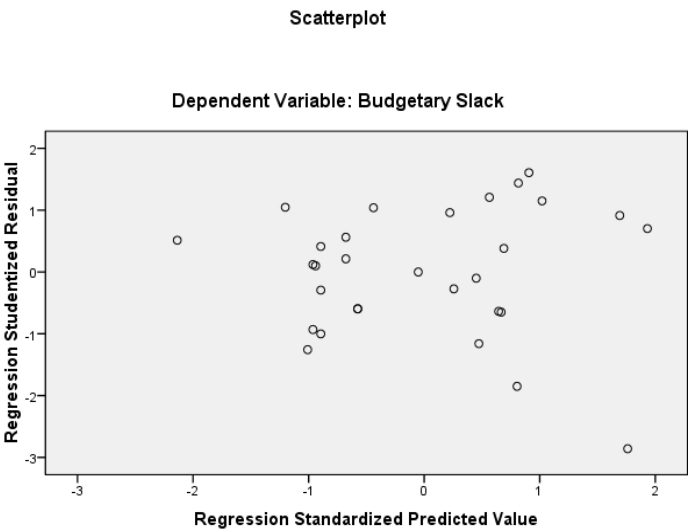
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz ed Predicted Value
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	14.1333333
	Std. Deviation	2.57255379
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.151
	Negative	-.107

Kolmogorov-Smirnov Z	.826
Asymp. Sig. (2-tailed)	.503

a. Test distribution is Normal.

Charts



Collinearity Statistics

Tolerance	VIF
.375	2.668
.375	2.668

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.670 ^a	.449	.408	2.954
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	191.923	2	95.961	11.000	.000 ^a
	Residual	235.544	27	8.724		
	Total	427.467	29			

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.943	2.036		2.428	.022
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.557	.214	.607	2.600	.015
Kualitas Laporan Keuangan	.059	.175	.078	.334	.741

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Correlations

		Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kualitas Laporan Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	1	.693**	.738**
	Sig. (2- tailed)		.000	.000
	N	30	30	30
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation	.693**	1	.830**
	Sig. (2- tailed)	.000		.000
	N	30	30	30
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pearson Correlation	.738**	.830**	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp. (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 119/PIP/LEMLIT-UNISAN/III/2023
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada YTH.
Kepala Kesbangpol Kab. Pohuwato
Di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN : 0929117202
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Meita Kaligis
 NIM : E1119102
 Fakultas : Fakultas Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Lokasi Penelitian : BKD Kabupaten Pohuwato
 Judul penelitian : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 20 Maret 2023

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN : 0929117202

Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jln. MH Tamrin No. 1 Blok Plan Perkantoran Tlp. (0443) 210484 Fax. (0443) 210856

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 900/BPKPD/213/VI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah, Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : **MEITA MELATI KALIGIS**
Nim : E1119102
Fakultas : Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : Akuntansi
TTL : Marisa, 12 September 1999
Alamat : Desa Maleo Kec, Paguat Kab, Pohuwato

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO)".

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Marisa, 09 Mei 2023
Mengetahui
An. Kepala BPKPD Kab, Pohuwato
SEKERTARIS

SUWARTONO HULAWA, SE
NIP. 19750302 200003 1 003

Lampiran 6 Surat Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 097/SRP/FE-UNISAN/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Meita Kaligis
NIM : E1119102
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 17%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Dekan,


DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 08 April 2023
Tim Verifikasi,



Muh. Sabir M. SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

Lampiran 7 Hasil Turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:33397905

PAPER NAME

SKRIPSI MEITA MELATI KALIGIS FIX.docx

AUTHOR

MEITA MELATI KALIGIS

WORD COUNT

10287 Words

CHARACTER COUNT

66456 Characters

PAGE COUNT

77 Pages

FILE SIZE

269.6KB

SUBMISSION DATE

Apr 1, 2023 3:12 PM GMT+8

REPORT DATE

Apr 1, 2023 3:13 PM GMT+8**● 17% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)



Similarity Report ID: oid:25211:33397905

17% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

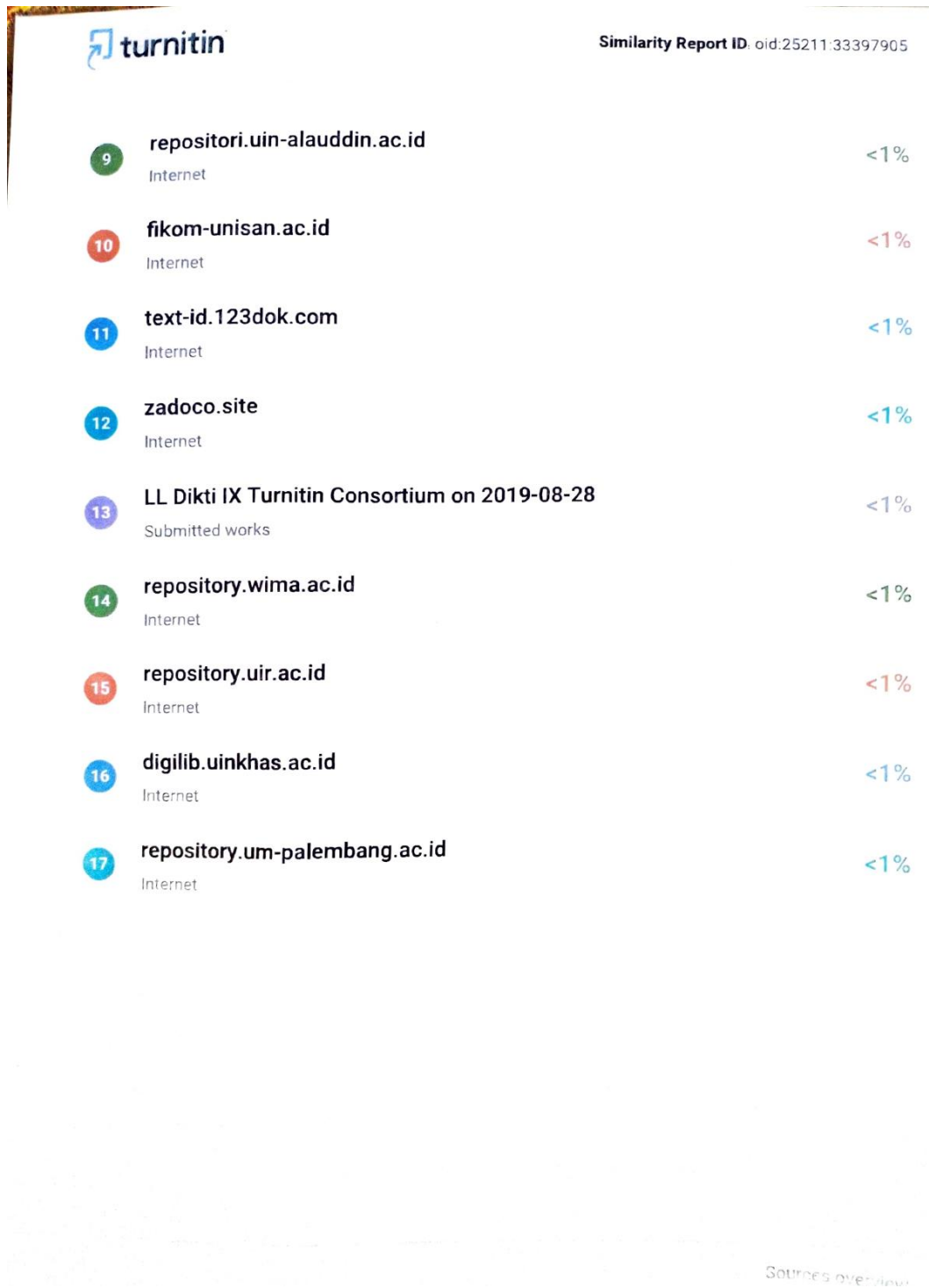
- 17% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	journal.stieamkop.ac.id	4%
	Internet	
2	repositori.usu.ac.id	4%
	Internet	
3	download.garuda.kemdikbud.go.id	2%
	Internet	
4	core.ac.uk	1%
	Internet	
5	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16	<1%
	Submitted works	
6	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
7	scribd.com	<1%
	Internet	
8	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	<1%
	Submitted works	

Sources overview



Lampiran 8***CURRICULUM VITAE*****1. Identitas Pribadi**

Nama	: Meita Kaligis
NIM	: E1119102
Tempat/tgl lahir	: Pinaling/17 Mei 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Angkatan	: Tahun 2019
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Agama	: Kristen Advent
Alamat	: Desa Maleo Kec. Paguat

2. Riwayat Pendidikan

- 1) Menyelesaikan pendidikan formal yang pertama di Sekolah Dasar (SD) Inpres Pinaling pada tahun 1998
- 2) Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Tombasian dan lulus pada tahun 2001
- 3) Kemudian melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Amurang dan lulus pada tahun 2004
- 4) Dan saat ini sedang menjalani perkuliahan di Universitas Ichsan Gorontalo, sebagai mahasiswa semester akhir jurusan Akuntansi yang terdaftar sejak tahun 2019.